



LAPORAN KEUANGAN

Kantor Camat Hulu Gurung
Tahun Anggaran 2022

Terdiri dari :

NERACA

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KANTOR KECAMATAN HULU GURUNG

Jl. Lintas Selatan KM 117 No. 01 Nanga Tepuai Kode Pos : 78764

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2022

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nanga Tepuai, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Drs. H. BAHARUDIN
NIP. 19670718 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN HULU GURUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah			0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00	
6	Lain-lain PAD yang sah			0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	-	0,00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	2.056.075.220,00	2.048.193.158,00	99,62	2.068.261.739,00
38	Belanja Barang dan Jasa	496.779.790,00	486.787.787,00	97,99	533.688.200,00
39	Bunga				
40	Subsidi				
41	Hibah	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
42	Bantuan Sosial				
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	2.600.855.010,00	2.582.980.945,00	99,31	
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah				
47	Belanja Peralatan dan Mesin	88.618.000,00	88.600.000,00		61.475.000,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan			0,00	
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	Jumlah Belanja Modal (46 + 51)	88.618.000,00	88.600.000,00		61.475.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.689.473.010,00	2.671.580.945,00	99,33	61.475.000,00
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 57 - 64)	-2.689.473.010,00	-2.671.580.945,00	99,33	-61.475.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN HULU GURUNG
LAPORAN OPERASIONAL
 PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0,00	
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
Dana Alokasi Umum		0,00	
Dana Alokasi Khusus		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		-	0
Dana Desa		-	0
Dana Penyesuaian		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
Pendapatan Dana BOS		0	0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
Pendapatan Hibah BOS		-	
Pendapatan Hibah Provinsi		-	
Lain-Lain Pendapatan		0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	2.094.998.158,00	2.068.261.739,00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	118.133.590,00	66.207.300,00
Beban Jasa	7.5.2.1.3	157.755.157,00	124.197.100,00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	15.100.000,00	61.570.000,00
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	164.125.600,00	177.713.800,00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7		104.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.8		
Beban Penyusutan	7.5.2.1.9	658.164.372,62	651.606.267,69
Beban Amortisasi	7.5.2.1.10		
Beban Hibah	7.5.2.1.11	48.000.000,00	
Beban Bansos	7.5.2.1.12		
Beban Beasiswa	7.5.2.1.13		
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.14	32.330.940,00	
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.15	5.340.189,62	
Beban Lain-lain	7.5.2.1.16		
Jumlah Beban Operasi		3.293.948.007,24	3.253.556.206,69
BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		3.293.948.007,24	3.253.556.206,69
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	07:05:03	-3.293.948.007,24	-3.253.556.206,69

SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-3.293.948.007,24	-3.253.556.206,69
PENDAPATAN LUAR BIASA	07:05:05		
Pendapatan Luar Biasa		0	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	07:05:06	-3.293.948.007,24	-3.253.556.206,69



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
KECAMATAN HULU GURUNG
Per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	ASET	07:04:01		
2	ASET LANCAR	7.4.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.4.1.1.1	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.1.1.2	-	0,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.1.1.3	-	0,00
7	Kas Lainnya-Kas Di BLUD	7.4.1.1.4	0,00	0,00
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	7.4.1.1.5	0,00	0,00
9	Kas Lainnya-FKTP	7.4.1.1.6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya-Sisa Dana BOSDA	7.4.1.1.7	0,00	0,00
11	Kas Lainnya - Jasa Giro	7.4.1.1.8	0,00	0,00
	Kas Lainnya - Saldo PFK		0,00	
12	Piutang Pajak	7.4.1.1.9	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi	7.4.1.1.10	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.4.1.1.11	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	7.4.1.1.12	0,00	0,00
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	7.4.1.1.13	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.4.1.1.14	-	0,00
20	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.4.1.1.15	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	7.4.1.1.16	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-
23	Persediaan	7.4.1.1.17	0,00	0,00
24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)		0,00	0,00
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.4.1.2		
27	Investasi Nonpermanen	7.4.1.2.1		
28	Dana Bergulir		0,00	0,00
29	Penyisihan Dana Bergulir		-	-
30	Jumlah Investasi Nonpermanen (27 s/d 29)		0,00	0,00
32	Investasi Permanen	7.4.1.2.1		
33	Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR			0,00
34	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu			0,00
35	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas			0,00
36	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA			0,00
37	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri			0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
40	Investasi Permanen Lainnya		-	-
41	Jumlah Investasi Permanen (33 s/d 40)		0,00	0,00
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 41)		0,00	0,00
No	Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
44	ASET TETAP	7.4.1.3		
45	Tanah	7.4.1.3.1	165.875.200,00	165.875.200,00
46	Peralatan dan Mesin	7.4.1.3.2	1.001.202.440,38	896.152.630,00
47	Gedung dan Bangunan	7.4.1.3.3	3.862.060.813,30	3.862.060.813,30
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.4.1.3.4	5.856.431.062,27	5.856.431.062,27
49	Aset Tetap Lainnya	7.4.1.3.5	0,00	0,00
50	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.4.1.3.6	0,00	0,00
51	Akumulasi Penyusutan	7.4.1.3.7	(6.594.637.019,85)	(5.916.722.647,22)
52	Jumlah Aset Tetap (45 s/d 51)		4.290.932.496,10	4.863.797.058,35
54	DANA CADANGAN			
55	Dana Cadangan		-	-
56	Jumlah Dana Cadangan (55)		-	-
58	ASET LAINNYA	7.4.1.5		
59	Tagihan Penjualan Angsuran	7.4.1.5.1	-	-
60	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.2	0,00	0,00
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.3	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.1.5.4	-	-
64	Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.5	0,00	0,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.6	-	-
66	Aset Lain-lain	7.4.1.5.7	84.470.000,00	84.470.000,00
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.4.1.5.8	-	-
	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.4.1.5.9		
68	Jumlah Aset Lainnya (59 s/d 67)		84.470.000,00	84.470.000,00
69	JUMLAH ASET (24 + 42 + 52 + 56 + 68)		4.375.402.496,10	4.948.267.058,35

71	KEWAJIBAN	07:04:02		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.2.1		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
74	Utang Bunga		-	-
75	Utang Jasa Medis		-	-
76	Utang Belanja	7.4.2.1.3	49.502.500,00	0,00
77	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		-	-
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.2.1.3	-	-
80	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)		49.502.500,00	0,00
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s/d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (80 + 88)		49.502.500,00	0,00
90	EKUITAS DANA			
91	JUMLAH EKUITAS DANA	07:04:03	4.325.899.996,10	4.948.267.058,35
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	07:04:04	4.375.402.496,10	4.948.267.058,35



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN HULU GURUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	4.948.267.058,35	5.538.398.326,03
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2	(3.293.948.007,24)	(3.253.556.206,69)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.6.3	-	-
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	-
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	-
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	-
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	-
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	-
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	-
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	-
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	-
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	-
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	-
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	19.750.000,00	-
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	(19.750.000,00)	-
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	-
18	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	-
19	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	-
20	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	-
21	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	-
22	RK-PPKD		2.671.580.945,00	2.663.424.939
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	4.325.899.996,10	4.948.267.058,35

BAB I

PENDAHULUAN

-

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Hulu Gurung merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan oleh karenanya wajib menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kecamatan Hulu Gurung berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Penyajian Laporan Keuangannya terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu elemen laporan keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, di dalam CaLK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka Laporan Keuangan.

1.2 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan Kecamatan Hulu Gurung per 31 Desember 2022, yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana, Realisasi Belanja dan beban yang terjadi selama tahun 2022 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kecamatan Putussibau Selatan menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Hulu Gurung mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Informasi Umum
 - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
 - 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan

- IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

- V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro.

Perekonomian yang cukup stabil tahun 2022 secara umum tidak mempengaruhi asumsi atau perkiraan awal biaya dan harga yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKA / DPA tahun anggaran 2022.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2022 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** dengan Indikator terlaksananya administrasi atau jasa perkantoran serta pelayanan pada pelaksanaan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Hulu Gurung;
2. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** dengan Indikator terpenuhi dan terpeliharanya hubungan masyarakat, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Hulu Gurung seperti Kendaraan Dinas dan Kantor;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Hulu Gurung

Dari dua program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Hulu Gurung Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 664.000 Realisasi Rp.00,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Anggaran Rp. 1.100.000,00 Realisasi Rp.00,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Belanja Gaji Pokok PNS Anggaran Rp. 1.028.820.345,00 Realisasi Rp. 1.028.172.800,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK Anggaran Rp. 20.102.708,00 Realisasi Rp. 18.530.400,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS Anggaran Rp.114.817.822. Realisasi Rp. 114.486.020,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Anggaran Rp. 3.001.924,00 Realisasi Rp. 2.594.256,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS Anggaran Rp. 73.969.000,00 Realisasi Rp. 73.700.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Anggaran Rp. 31.809.500,00 Realisasi Rp. 31.700.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Anggaran Rp.1.458.000.00 Realisasi Rp. 1.260.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS Anggaran Rp.62.060.319,00 Realisasi Rp. 61.846.680,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK Anggaran Rp.2.346.408.00 Realisasi Rp. 2.027.760,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Anggaran Rp.1.699.415,00 Realisasi Rp. 1.693.418,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS Anggaran Rp.12.963.00 Realisasi Rp. 12.963,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK Anggaran Rp.651.00 Realisasi Rp. 447,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Anggaran Rp.65.918.904.00 Realisasi Rp. 63.637.422,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Anggaran Rp.908.175.00 Realisasi Rp. 847.472,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Anggaran Rp.2.124.396,00 Realisasi Rp. 2.116.844,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Anggaran Rp.45.106.00 Realisasi Rp. 38.118,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Anggaran Rp.6.373.258,00 Realisasi Rp. 6.350.598,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Anggaran Rp.135.326,00 Realisasi Rp. 114.360,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Anggaran Rp.563.491.000,00 Realisasi Rp. 563.491.000,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Anggaran Rp.3.000.000,00 Realisasi Rp. 2.000.000,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Anggaran Rp. 71.940.000,00 Realisasi Rp. 71.940.000,00
- **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** Anggaran Rp. 2.040.000,00 Realisasi Rp. 2.040.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 286.000,00 Realisasi Rp. 286.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Anggaran Rp. 1.050.000,00 Realisasi Rp. 1.050.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Anggaran Rp. 750.000,00 Realisasi Rp. 750.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 504.000,00 Realisasi Rp. 504.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Anggaran Rp. 1.250.000,00 Realisasi Rp. 1.250.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Anggaran Rp. 750.000,00 Realisasi Rp. 750.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Belanja Pakaian Olahraga Anggaran Rp. 13.750.000,00 Realisasi Rp. 13.750.000,00
-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Belanja Bimbingan Teknis Anggaran Rp. 32.400.000,00 Realisasi Rp. 32.330.940,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Anggaran Rp. 4.150.000,00 Realisasi Rp. 4.150.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Anggaran Rp. 8.856.800,00 Realisasi Rp. 8.856.800,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Anggaran Rp. 180.000,00 Realisasi Rp.00,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Anggaran Rp. 4.200.000,00 Realisasi Rp. 4.200.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Anggaran Rp. 1.980.000,00 Realisasi Rp. 1.980.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Anggaran Rp.13.874.800,00 Realisasi Rp. 13.874.800,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Anggaran Rp. 3.000.000,00 Realisasi Rp. 3.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Anggaran Rp. 10.430.000,00 Realisasi Rp. 5.225.600,00
- **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** Anggaran Rp. 90.500.000,00 Realisasi Rp. 90.500.000,00
-
-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Anggaran Rp. 25.900.000,00 Realisasi Rp. 25.900.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Anggaran Rp. 20.000.000,00 Realisasi Rp. 20.000.000,00
- Belanja Modal Personal Computer Anggaran Rp. 26.998.000,00 Realisasi Rp. 26.980.000,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Anggaran Rp. 15.720.000,00 Realisasi Rp. 15.720.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Anggaran Rp. 800.000,00 Realisasi Rp. 800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Belanja Tagihan Air Anggaran Rp.5.400.000,00 Realisasi Rp.5.400.000,00
- Belanja Tagihan Listrik Anggaran Rp. 12.000.000,00 Realisasi Rp. 8.200.820,00
- **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** Anggaran Rp. 4.800.000,00 Realisasi Rp. 3.750.937,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Anggaran Rp.21.420.000,00 Realisasi Rp.21.420.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Anggaran Rp. 6.120.000,00 Realisasi Rp. 6.120.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Anggaran Rp. 20.400.000,00 Realisasi Rp. 20.400.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Anggaran Rp.93.000.000,00 Realisasi Rp.93.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Anggaran Rp. 31.950.000,00 Realisasi Rp. 33.700.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Anggaran Rp. 3.720.000,00 Realisasi Rp. 3.720.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Anggaran Rp. 223.200,00 Realisasi Rp. 186.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Anggaran Rp. 279.000,00 Realisasi Rp. 232.500,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Anggaran Rp. 4.400.000,00 Realisasi Rp. 4.400.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Anggaran Rp.6.500.000,00 Realisasi Rp. 6.500.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Anggaran Rp. 4.200.000,00 Realisasi Rp. 4.200.000,00

3.1.1 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Anggaran Rp. 1.500.000,00 Realisasi Rp. 1.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Anggaran Rp.9.750.000,00 Realisasi Rp.9.750.000,00

Belanja Pakaian Paskibraka Anggaran Rp. 3.741.990,00 Realisasi Rp. 3.741.990,00

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Anggaran Rp. 8.500.000,00 Realisasi Rp. 8.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Anggaran Rp. 68.400.000,00 Realisasi Rp. 68.400.000,00

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Anggaran Rp. 8.500.000,00 Realisasi Rp. 8.500.000,00

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Anggaran Rp. 39.500.000,00 Realisasi Rp. 39.500.000,00

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Dalam pencapaian target yang ada masalah hambatan dan kendala secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti pada Anggaran yang telah ditetapkan dan dipergunakan semaksimal mungkin sesuai pos yang ada. Permasalahan teknis dalam pembuakuan terjadi pada **Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer terdapat kelebihan penarikan sebesar Rp. 1.750.000,00 ditahun 2022 dikarenakan telah lewat tahun anggaran, maka uang tersebut di setor pada tahun 2023 adapun bukti setor (STS Terlampir**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual juga digunakan dalam pengakuan Pendapatan dan Belanja LO. Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset

tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

4.3.2 Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

4.3.3 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.4 Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

4.3.5 Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang

lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6 Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.7 Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

4.4.1 Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan

keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

4.4.2 Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

4.4.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4.4.4 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitur.

4.4.5 Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4.4.5 Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan(*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat dalam waktu 12(dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

4.4.5 Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

4.4.5 Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam

bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Belanja

5.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan penghasilan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.028.820.345,00	1.028.172.800,00	99,94
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.102.708,00	18.530.400,00	92,18
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114.817.822,00	114.486.020,00	99,71
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.001.924,00	2.594.256,00	86,42
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	73.969.000,00	73.700.000,00	99,64
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.809.500,00	31.700.000,00	99,66
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.458.000,00	1.260.000,00	86,42
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.060.319,00	61.846.680,00	99,66
9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.346.408,00	2.027.760,00	86,42
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.699.415,00	1.693.418,00	99,65
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.963,00	12.963,00	100,00
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	651,00	447,00	68,66
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65.918.904,00	63.637.422,00	96,54
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	908.175,00	847.472,00	93,32
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.124.396,00	2.116.844,00	99,64
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	45.106,00	38.118,00	84,51
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.373.258,00	6.350.598,00	99,64
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	135.326,00	114.360,00	84,51
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	563.491.000,00	563.491.000,00	100,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
21	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.940.000,00	71.940.000,00	100,00
22	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
	Jumlah	2.056.075.220,00	2.048.600.558,00	99,63

1.2. Belanja Barang & Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Hulu Gurung dalam pelaksanaan kegiatan, belanja kegiatan harian kantor,serta belanja barang dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.310.800,00	9.646.800,00	93,56
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.580.000,00	2.300.000,00	64,25
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.874.800,00	13.874.800,00	100,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.150.000,00	30.150.000,00	100,00
12	Belanja Pakaian Olahraga	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00
13	Belanja Pakaian Paskibraka	3.741.990,00	3.741.990,00	100,00
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.950.000,00	33.700.000,00	105,48
16	Belanja Tagihan Air	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
17	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	8.200.820,00	68,34
18	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	3.750.937,00	78,14
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	223.200,00	186.000,00	83,33
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	279.000,00	232.500,00	83,33
22	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
23	Belanja Bimbingan Teknis	32.400.000,00	32.330.940,00	99,79
24	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
25	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-	-
29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-	-
30	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.430.000,00	5.225.600,00	50,10
31	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	158.900.000,00	158.900.000,00	100,00
	Jumlah	496.779.790,00	486.380.387,00	97,90

1.2 Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00
	Jumlah	969.123.980,00	950.269.174,00	100,00

1.3 Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.900.000,00	25.900.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal Personal Computer	26.998.000,00	26.980.000,00	99,93
4	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-
5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.720.000,00	15.720.000,00	100,00
	Jumlah	88.618.000,00	88.600.000,00	100,00

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset Lancar

5.2.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten kapuas Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp. 00,00,-

5.2.1.2. Persediaan

Saldo persediaan pada Kecamatan Hulu Gurung kapuas Hulu per 31 desember 2022 terdiri dari persediaan Rp.00,00

5.2.2 Aset Tetap

5.2.2.1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 desember 2021 sebesar Rp. 165.875.200,00 dan per 31 desember 2022 sebesar Rp.165.875.200,00

5.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat

- Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.00,00- saldo alat-alat berat per 31 desember 2022 adalah Rp. 00,00,-

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Angkutan

- Saldo aset tetap alat Alat-alat Angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 277.029.270,00 terdapat penambahan Mutasi asset masuk sebesar nilai Rp. 19.750.000,00 dari DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SEPEDA MOTOR HONDA GL KB 3577 FN Pengguna a.n. MUCHRIM, A.Md maka saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp. 296.779.270,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan alat ukur

- Saldo aset tetap Alat-alat Bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2021 senilai Rp.6.500.000,00 dan saldo akhir per 31 desember 2022 senilai Rp.6.500.000,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian dan Peternakan

- Saldo Aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan tahun 2021 senilai Rp.3.500.000,00 dan pada tahun 2022 senilai Rp.3.500.000,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Saldo aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2021 Rp. 159.425.000,00 terdapat penambahan dari belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 45.900.000,00 terdiri dari :
 - a. Filing Kabinet 7 unit harga satuan Rp. 3.700.000,00 x 7 = Rp. 25.900.000,00
 - b. Mesin Penghancur kertas 1 Unit harga satuan Rp.10.000.000,00 x 1 = Rp. 10.000.000,00
 - c. Mesin Potong Rumput 2 Unit harga satuan Rp 5.000.000,00 x 2 = Rp. 10.000.000,00

Adapun dari penambahan aset, dari belanja modal di tahun 2022 mengakibatkan bertambahnya asset ditahun 2022 dan ditambah atribusi sebesar Rp.1.056.839,73 sehingga saldo akhir pada tahun 2022 sebesar Rp. 206.381.839,73

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Komputer

- Saldo aset tetap Komputer pada tahun 2021 sebesar Rp. 351.686.360,00 dan pada tahun 2022 terdapat penambahan dari belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 42.700.000,00 dengan rincian
 - a. P.C Lenovo Cor i5 2 Unit harga satuan Rp. 13.490.000,00 x 2 = Rp. 26.980.000,00
 - b. Printer Epson L 3110 3 unit harga satuan Rp. 3.500.000,00 x 3 = Rp. 10.500.000,00
 - c. UPS 700 VA 6 Unit harga satuan Rp. 870.000,00 x 6 = Rp. 5.220.000,00

Adapun dari penambahan asset, dari belanja modal di tahun 2022 mengakibatkan bertambahnya asset ditahun 2022 dan ditambah atribusi sebesar Rp. 983.160,27 sehingga asset dari belanja modal sebesar Rp. 395.369.520,27 kemudian dikurangi asset ekstrakontabel sebesar (Rp.5.340.189,62) dikarenakan belanja modal 6 UPS 700 VA harga satuan Rp. 870.000,00 di bawah nilai 1.000.000,00 atau di bawah nilai minimum terdapat dalam kebijakan akuntansi, maka dikategorikan asset ekstrakontabel. Dari penambahan dan pengurangan asset tersebut di atas maka saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp. 390.029.330,65

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio dan Alat Komunikasi

- Saldo aset tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2021 Rp.98.012.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.98.012.000,00 tidak terdapat penambahan dan pengurangan

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kedokteran

- Saldo aset tetap Alat-alat Kedokteran pada tahun 2021 dengan nilai Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium

- Saldo aset tetap Alat Laboratorium pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Rambu-rambu

- Saldo aset tetap Alat Rambu-rambu pada tahun 2021 Rp.00,00 sedangkan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga

- Saldo aset tetap Alat Peraga pada tahun 2021 Rp.00,00 sedangkan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan

- Saldo aset tetap Alat Keamanan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 saldo akhir Rp.00,00

5.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

- Saldo aset tetap bangunan gedung pada tahun 2021 dengan nilai Rp.3.862.060.813,30 sedangkan pada tahun 2022 Rp. Rp.3.862.060.813,30 tidak ada penambahan dan pengurangan

Bangunan Monumen

- Saldo aset tetap Bangunan Monumen pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 dengan nilai Rp.00,00

5.2.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan

- Saldo aset tetap Jalan dan Jembatan pada tahun 2021 Rp.4.703.942.176,85 dan pada tahun 2022 Rp.4.703.942.176,85 tidak

terdapat penambahan dan pengurangan

Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air (Irigasi)

- Saldo aset tetap Bangunan Air (Irigasi) pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan- Instalasi

- Saldo aset tetap Instalasi pada tahun 2021 Rp.1.152.488.885,42 dan pada tahun 2022 Rp.1.152.488.885,42 tidak ada penambahan dan pengurangan

Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan

- Saldo aset tetap Jaringan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya- Buku dan Perpustakaan

- Saldo aset tetap Buku dan Perpustakaan pada tahun 2021 Rp. 00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00 tidak terdapat penambahan

Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

- Saldo aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Lainnya- Hewan / Ternak dan Tanaman

- Saldo aset tetap Hewan / Ternak dan Tanaman pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Saldo **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** tahun 2021 dengan nilai (Rp.5.916.722.647,22) dan pada tahun 2022 sebesar (Rp. 6.594.637.019,85)

adapun rincian adalah sebagai berikut :

1. Akumulasi penyusutan Alat Angkutan
Tahun 2021 (Rp. 274.113.555,71)
Tahun 2022 (Rp. 296.779.269,99)
Selisih/Kurang (Rp 22.665.714,29)

2. Akumulasi penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
Tahun 2021 (Rp.6.500.000,00)
Tahun 2022 (Rp.6.500.000,00)
Selisih/Kurang (Rp.00,00)

3. Akumulasi penyusutan Alat Pertanian
Tahun 2021 (Rp.3.500.000)
Tahun 2022 (Rp.3.500.000)
Selisih/Kurang (Rp.00,00)

4. Akumulasi penyusutan Kantor dan Rumah Tangga
Tahun 2021 (Rp. 120.985.000,00)
Tahun 2022 (Rp. 14.9251.367,95)
Selisih/Kurang (Rp. 28.266.367,95)

5. Akumulasi penyusutan Alat studio dan Komunikasi dan Pemancar
Tahun 2021 (Rp. 86.552.000,00)
Tahun 2022 (Rp. 90.372.000,00)
Selisih/Kurang (Rp. 3.820.000,00)

6. Akumulasi penyusutan Komputer
Tahun 2021 (Rp. 277.086.360,00)
Tahun 2022 (Rp. 309.854.954,13)
Selisih/Kurang (Rp. 32.768.594,13)

7. Akumulasi penyusutan Bangunan Gedung
Tahun 2021 (Rp. 1.154.334.212,95)
Tahun 2022 (Rp. 1.245.521.469,39)
Selisih/Kurang (Rp. 91.187.256,44)

8. Akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan
Tahun 2021 (Rp. 3.763.153.741,48)
Tahun 2022 (Rp. 423.3547.959,17)

Selisih/Kurang (Rp. 470.394.217,69)

9. Akumulasi penyusutan Jaringan

Tahun 2021 (Rp. 230.497.777,08)

Tahun 2022 (Rp. 259.309.999,22)

Selisih/Kurang (Rp. 28.812.222,14)

5.2.2.8. ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat asset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat asset lainnya Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat asset lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat asset lainnya terdapat Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat asset lainnya Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

- Saldo aset tetap aset lain-lain pada tahun 2021 Rp.84.470.000,00 tidak terdapat penambahan dan pengurangan maka aset tetap aset lain-lain Kecamatan Hulu Gurung pada tahun 2022 sebesar Rp.84.470.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

- Kecamatan Hulu Gurung memiliki akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp.00,00)

5.2.3 Kewajiban

5.2.3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Peruntukan Pada Fihak Ketiga (PFK)

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat Kewajiban Jangka Pendek Utang Peruntukan Pada Fihak Ketiga (PFK)

Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat Kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan

Utang Belanja

- Kecamatan Hulu Gurung Kewajiban Utang Belanja pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 49.502.500,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak terdapat Kewajiban Utang Jangka Pendek Lainnya

5.2.3.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak Memiliki Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri

Utang Luar Negeri

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak memiliki kewajiban jangka panjang Utang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

- Kecamatan Hulu Gurung Tidak memiliki kewajiban jangka panjang utang jangka panjang lainnya

5.2.4 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4948267058,35 sedangkan pada tahun 2022 Rp. 4.325.899.996,10

5.3 Penjelasan Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Kecamatan Hulu Gurung per 31 Desember 2022.

5.3.2 Beban

Rincian beban pada Kantor Kecamatan Hulu Gurung per 31 Desember 2022 adalah

sebagai berikut:

5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pegawai
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.028.172.800,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	18.123.000,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114.486.020,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.594.256,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	73.700.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.700.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.260.000,00
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.846.680,00
9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.027.760,00
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.693.418,00
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.963,00
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	447,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	63.637.422,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	847.472,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.116.844,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	38.118,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.350.598,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	114.360,00
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	563.491.000,00
20	Hutang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2022	48.345.000,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.000.000,00
22	Hutang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Bulan Desember 2022	500.000,00
23	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.940.000,00
	Jumlah	2.094.998.158,00

5.3.2.2. Beban Persediaan

Jumlah beban Persediaan pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Persediaan
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000,00
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.980.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.646.800,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.300.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.700.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.150.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.874.800,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.420.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.120.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.150.000,00
12	Belanja Pakaian Olahraga	13.750.000,00
13	Belanja Pakaian Paskibraka	3.741.990,00
	Beban Persediaan	118.133.590,00

5.3.2.3. Beban Jasa

Jumlah beban Jasa pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Jasa
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.000.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.700.000,00
3	Belanja Tagihan Air	5.807.400,00
4	Belanja Tagihan Listrik	8.200.820,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.750.937,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.720.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	186.000,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	232.500,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.500.000,00
10	Hutang Jasa Listrik	657.500,00
	Jumlah	157.755.157,00

5.3.2.4. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Hibah
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.500.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.500.000,00
	Jumlah	48.000.000,00

5.3.2.5. Beban pemeliharaan

Jumlah Beban pemeliharaan pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pemeliharaan
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.400.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.500.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.200.000,00
	Jumlah	15.100.000,00

5.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.225.600,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	158.900.000,00

	Jumlah	164.125.600,00
--	--------	----------------

5.3.2.6. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

Jumlah Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS
1	Belanja Bimbingan Teknis	32,330,940,00
	Jumlah	32.330.940,00

5.3.2.7. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Beban
1	Sub Total - ALAT ANGKUTAN	2.915.714,29
2	Sub Total - ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	00,00
3	Sub Total - ALAT PERTANIAN	00,00
4	Sub Total - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	28.266.367,95
5	Sub Total - ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.820.000,00
6	Sub Total - KOMPUTER	32.768.594,13
7	Sub Total - BANGUNAN GEDUNG	91.187.256,44
8	Sub Total - JALAN DAN JEMBATAN	470.394.217,69
9	Sub Total - JARINGAN	28.812.222,14
	Jumlah	658.164.372,62

5.3.2.8. Beban Ekstrakomptabel

Jumlah Beban Ekstrakomptabel pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Beban
1	UPS 6 Unit x Rp.890.031,60	5.340.189,62
	Jumlah	5.340.189,62

5.3.2.7. Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO pada Kantor Camat Hulu Gurung per 31 desember 2021 (Rp. 3.253.556.206,69) dan pada tahun 2022 sebesar (Rp. 3.293.948.007,24)mengalami kenaikan sebesar (Rp. 40.391.800,55)

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas awal

Ekuitas akhir Neraca Tahun 2021 merupakan Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp.4.948.267.058,35 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya setelah memperhitungkan Penyusutan dan Amortisasi Aset. Maka ekuitas akhir tahun 2022 Rp. 4.325.899.996,10

5.3.2. Surplus/Defisit LO

Merupakan defisit antara Pendapatan LO dan Beban LO Kecamatan Hulu Gurung Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (Rp. 3.253.556.206,69) sedangkan di tahun 2021 sebesar (Rp.3.293.948.007,24)

5.3.3. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak kumulatif akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi ekuitas Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 adalah

- **Penyesuaian Kas Bendahara**
Kecamatan Hulu Gurung tidak terdapat Pengeluaran
- **Koreksi Nilai Persediaan**
Kecamatan Hulu Gurung tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan
- **Koreksi Aset Tetap**
Kecamatan Hulu Gurung terdapat koreksi aset tetap pada LPE yaitu, terdapat mutasi masuk sepeda Motor dengan nilai Rp.19.750.000,00 maka nilai tersebut mempengaruhi Dampak Komulatif serta Mempengaruhi Nilai Ekuitas Akhir

- **Koreksi Aset Lainnya**

Kecamatan Hulu Gurung tidak terdapat Koreksi Aset Lainnya

- **Koreksi Penyusutan**

Kecamatan Hulu Gurung memiliki koreksi penyusutan dari nilai mutasi masuk sepeda motor dengan nilai Minus (Rp.19.750.000,00) sebesar Nilai aset pada Penyesuaian Penyusutan di tahun 2022

- **RK-PPKD**

pada Kecamatan Hulu Gurung yang harus dieliminasi per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.266.3424.939,00 dan 2022 sebesar Rp. 2.671.580.945,00

- **EKUITAS AKHIR**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. pada Kecamatan Hulu Gurung per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp 4.948.267.058,35 dan 2022 sebesar Rp. 4.325.899.996,10

BAB VI
P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Pengguna Anggaran,

Drs. H. BAHARUDIN
NIP. 196707181995031002